


EFEKTIVITAS PROGRAM *E-PARKING* DALAM MEWUJUDKAN *SMART CITY* DI KOTA SEMARANG

Agnes Aprilia Rahmawati, Maesaroh, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id 

Abstract

The effectiveness of the e-parking program in Semarang City faces several challenges. This starts from the number of points as many as 436 points and 376 jukirs, making it difficult for jukirs to supervise 2 to 3 points at once which are located 1km on one road. In addition, the realization of PAD for 2022-2023 is not in accordance with the target set by the government. This study aims to analyze the effectiveness of the program and analyze various factors that drive and inhibit the effectiveness of the e-parking program in developing a smart city in Semarang City. This research method is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The sampling used was snowball sampling and data validity through source triangulation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of this study were analyzed using the Makmur theory while the driving and inhibiting factors were analyzed using Ripley's theory in Erwan and Dyah. Accuracy in carrying out orders, accuracy of targets, accuracy in determining time, accuracy in measurement have been effective, while accuracy in calculating costs, accuracy in making choices, accuracy in setting goals, accuracy in thinking have not been effective. The supporting factors include coverage, bias, and accountability, while the inhibiting factors are access, frequency, service accuracy, and program suitability. The recommendations of this study are to improve the expansion of access in making complaints, seek to understand the ease of electronic parking, seek to socialize e-parking to the public, seek to increase public awareness about easy, fast, and safe e-parking transactions, suggestions to minimize inhibiting factors related to access by providing socialization of complaints about e-parking, for frequency by seeking awareness of the convenience of e-parking in the community, for the accuracy of services with the socialization of e-parking in the community, for the suitability of programs related to the needs of the community that are easy, fast and safe with the socialization of e-parking in the community.

Keywords: *Effectiveness, E-Parking Program, Smart City*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk dari kemajuan zaman adalah teknologi. Saat ini, teknologi semakin banyak dipergunakan oleh masyarakat di segala kalangan.

Internet, atau teknologi berbasis web, merupakan salah satu teknologi yang paling maju. Ketersediaan teknologi internet di dunia saat ini memungkinkan Publik untuk mendapatkan data secara cepat, akurat, dan tepat. Dengan teknologi internet membantu setiap

pekerjaan yang pada mulanya Dilakukan secara manual serta memakan waktu lama, namun dengan kemajuan teknologi internet serta sistem komputer modern, proses pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Adapun sistem *on-line* sering juga disebut sistem daring (dalam jaringan) kini semakin terkenal juga meluas di masyarakat Indonesia.

Di pemerintahan sendiri, pemanfaatan teknologi internet disebut *e-government*. *E-government* di negara Indonesia bermula dengan munculnya Inpres No 3/2003 mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, adanya intruksi ini dibuat dengan pertimbangan kebermanfaatan ICT (*Informartion and Communication Technologies*) yaitu meningkatkan kualitas serta efisiensi dalam proses penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat (Yuniadi M, 2016: 15). Sebagai respon dari peningkatan kualitas juga efisiensi dalam proses penyelenggaraan pelayanan sendiri Kota Semarang menciptakan program *e-parking* sebagai upaya menuju *e-government* ditingkat lokal dimana diterapkan pada sektor perparkiran guna memberi kemudahan untuk masyarakat. *E-parking* merupakan perangkat yang gunanya menerima pembayaran parkir

secara eklektronik juga menggiring sebuah kota menuju kota pintar dengan langkah pemanfaatan teknologi (Firmansyah, B., dkk. 2023: 9).

Program *e-parking* di Kota Semarang diluncurkan pada Februari tahun 2022 oleh Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan dengan dasar Peraturan Wali Kota Semarang No 70 /2021 mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *E-parking* menjadi sebuah komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga ketertiban perparkiran di seluruh area Semarang juga parkir di area tepi jalan Kota Semarang.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bidang retribusi parkir kendaraan di Kota Semarang. Salah satu sumber PAD didapatkan dari retribusi daerah, seperti yang tertuang pada UU No 32 /2004 mengenai Perda Pasal 157., maka adanya peningkatan jumlah penduduk serta kepemilikan kendaraan dinilai sebagai hal yang penting serta harus di perhatikan pemerintah daerah. Retribusi parkir sendiri ialah suatu pembayaran yang dikenakan bagi pengguna area yang diatur oleh Pemerintah Daerah serta memungkinkan dalam pelaksanaanya juga ada kerjasama dengan sektor swasta (Dewi, Sheila Ratna. 2013: 6). Berikut

target serta realisasi PAD Kota Semarang dari retribusi parkir tepi jalan di Kota Semarang:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD dari Retribusi Parkir di Kota Semarang Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi Pendapatan
2021	1,68M	1,97 M
2022	4,64M	2,82 M
2023	5,01M	3,77 M

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024

Dari tabel 1.1 pada tahun 2021 memiliki realisasi pendapatan yang lebih dari target PAD yang ditentukan, tetapi untuk tahun 2022 dan 2023 realisasi PAD memiliki penurunan dari target yang ditentukan. Adanya realisasi pendapatan yang tidak sesuai target saat keberjalanan parkir elektronik seringkali disangkutkan dengan ketidakmudahan peralihan sistem parkir yang awalnya manual bergeser ke sistem *online*.

Kota Semarang menjadi salah satu dari 5 kota besar di Indonesia. Masyarakat Kota Semarang berdasar data BPS sejumlah 1.659.975 pada tahun 2022 dan meningkat hingga 1.694.743 pada tahun 2023 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023). Hal ini membuat tingkat kepemilikan barang pribadi salah satunya kendaraan

semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Berikut data peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang:

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Pribadi di Kota Semarang Tahun 2019-2022

Tahun	Sepeda Motor	Mobil
2019	112 Juta	20 Juta
2020	115 Juta	21 Juta
2021	120 Juta	21 Juta
2022	125 Juta	22 Juta

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Dari tabel 1.2 jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang meningkat selama 4 tahun terakhir. Jumlah kendaraan pribadi untuk sepeda motor meningkat dari 120.042.298 tahun 2021 menjadi 125.305.332 tahun 2022, dan untuk mobil meningkat dari 21.950.275 menjadi 22.956.485. Jumlah kendaraan pribadi di Kota Semarang yang meningkat berkaitan dengan efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang, adanya peningkatan

jumlah kendaraan pribadi membuat semakin bertambahnya pergerakan (mobilisasi) kendaraan di jalan dan pengelolaan parkir tepi jalan akan tetapi di Kota Semarang parkir tepi jalan belum dikelola dengan baik.

Berikut tabel jumlah dan lokasi titik parkir elektronik di Kota Semarang:

Tabel 1.3 Jumlah Jukir dan Lokasi Titik *E-Parking* di Kota Semarang

Lokasi	Titik	Jukir
Jl. Agus Salim	36	28
Jl. MT Haryono	81	67
Jl. Pekojan	48	43
Jl. Wahid Hasyim	75	69
Jl. Ahmad Dahlan	50	47
Jl. Erlangga Raya	51	42
Jl. Dargo	35	32
Jl. Tlogosari	12	9
Jl. Gajah Raya	7	2
Jl. Anjasmoro	14	2
Jl. Sutarna	19	9
Jl. Setia Budi	35	21
Total	436	376

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024

Dalam hal *Egovernment* yang dijalankan di Kota Semarang maka Pemkot Kota Semarang mencetuskan *e-parking* yang mana digunakan untuk memudahkan pelayanan bidang pembayaran parkir dengan teknologi berupa sistem secara

daring (dalam jaringan). *E-parking* di Kota Semarang dijalankan di 436 titik di Kota Semarang dan di percayakan ke 376 juru parkir pilihan yang diberikan pelatihan serta sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Masalah penelitian ini yang pertama ialah berkaitan dengan PAD yang tidak sesuai antara target dan realisasi di tahun 2022 dan 2023 di saat parkir elektronik tersebut sudah berjalan dirasa adanya pergeseran sistem retribusi dari manual ke *online* membuat target dan realisasi PAD tidak sesuai. Masalah kedua ialah berkaitan dengan *e-parking* di Kota Semarang yang sudah ditetapkan 436 titik *e-parking* yang harusnya diawasi oleh juru parkir di tiap titiknya tetapi di lapangan hanya terdapat 376 juru parkir yang diberikan pelatihan teknis mengenai *e-parking* oleh Dishub sehingga pengelolaan parkir di Kota Semarang belum baik dilihat dari kesulitan juru parkir untuk mengawasi 2 hingga 3 titik sekaligus yang lokasinya berjarak 1km sehingga juga itu membuat adanya parkir liar akibat adanya kesempatan saat titik *e-parking* lengah dari pengawasan juru parkir khusus dan

itu menjadikan adanya kebocoran PAD di Kota Semarang. Dari hal yang melatarbelakangi ini penulis tertarik mengambil judul **“Efektivitas Program *E-Parking* Dalam Mewujudkan *Smart City* Di Kota Semarang”** juga diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu melihat efektivitas program *e-parking* dan dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat efektivitas program *e-parking* di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

- a. Apakah Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang sudah efektif?
- b. Apa faktor pendorong dan penghambat efektivitas Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis efektivitas Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang.
- b. Untuk menganalisis berbagai faktor pendorong dan penghambat efektivitas Program *E-Parking* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang.

D. Kajian Teori

Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Caiden, adalah setiap kegiatan administrasi yang dilakukan untuk mengawasi faktor yang berkenaan pada masyarakat (Mindarti, 2016: 4). Woodrow Wilson, administrasi publik adalah proses pelaksanaan berbagai aspek yang mencakup semua urusan public (Hidayat, 2007: 22)

C.T.Goodsell, administrasi publik adalah upaya guna mencapai demokrasi serta memenangkan hati masyarakat. Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam penyediaan pelayanan publik dan daya saing yang terintegrasi dengan nilai-nilai efektivitas, legitimasi, efisiensi, keadilan, transparansi, dan ketergantungan. (Keban, 2008: 8).

Manajemen Publik

Sarinah dan Mardalena, Stephen P. Robbins dan Mary Coulter mendeskripsikan manajemen sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh para manajer yang meliputi mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan orang lain untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut

dilakukan dengan sukses serta efektif (Sarinah dan Mardalena, 2017: 1)

Manajemen publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manajemen yang mengkoordinasikan kepentingan beberapa orang. Organisasi pemerintahan sangat terikat dengan manajemen publik. Overman dalam Pasolong, manajemen publik ialah bidang studi interdisipliner yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen umum seperti pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan dengan keuangan, informasi, politik, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia di sisi lain (Pasolong, 2017:96). Efektivitas program diposisikan pada pengawasan atau pengendalian, yang menjamin bahwa Proses lengkap yang telah dirancang, dikelola, serta dijalankan dapat berfungsi secara efisien dan memenuhi sasaran yang diinginkan.

Efektivitas

Efektivitas menurut Campbell dan Anisah dan Soesilowati adalah sejauh mana suatu organisasi mampu melaksanakan tugas utamanya atau memenuhi tujuannya (Anisah & Soesilowati, 2018).

Efektivitas, menurut Tampieri dalam jurnal Daniel Esem Gbervbie dan Jide Ibieta, adalah tingkat keberhasilan tujuan dan kaitan dengan efek yang diinginkan dan efek aktual produk dalam mencapai tujuan (Jide & Gbervbie, 2013: 51). Emerson dalam Handyaningrat mendefinisikan Tingkat pencapaian sasaran yang telah direncanakan (Handyaningrat, 2011: 16).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukur sejauh mana target yang ditetapkan telah dipenuhi menurut pendapat ahli tersebut.

Efektivitas Program

Arikunto dalam Ristiawan program ialah sebagai kegiatan yang meliputi sekelompok individu yang melaksanakan suatu kebijakan dalam suatu organisasi secara berkesinambungan. (Ristiawan, 2019: 35). Dalam bukunya tentang efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2011:7), Makmur berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal, yaitu:

- a. Ketepatan penentuan waktu: dapat berpengaruh kepada seberapa efektif suatu program

- atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- b. Ketepatan perhitungan biaya: ini dilakukan agar program tidak kekurangan dana atau anggaran sampai program tersebut selesai.
 - c. Ketepatan dalam pengukuran: ini berarti bahwa standarisasi harus diterapkan saat menjalankan program. Keefektifitasan program diukur dengan ketepatan standar yang digunakan.
 - d. Ketepatan dalam menentukan pilihan: ini adalah tindakan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena menentukan pilihan menggabungkan proses yang sangat penting untuk mencapai keefektifitasan.
 - e. Ketepatan berpikir: dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
 - f. Ketepatan dalam melakukan perintah: ini adalah tindakan yang dapat memberikan instruksi dengan cara yang jelas dan mudah difahami.
 - g. Ketepatan dalam menetapkan tujuan: tujuan yang tepat akan membantu melakukan tugas dengan efektif.
 - h. Ketepatan sasaran: dapat menentukan apakah tindakan yang diambil berhasil mencapai tujuan.

Dalam menganalisis sejauh mana efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang ini berjalan, peneliti menerapkan teori ukuran efektivitas Makmur (2011:7)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Berbagai faktor yang berpengaruh pada efektivitas program menurut Ripley (Erwan dan Dyah, 2012: 105-110) meliputi :

- a. Akses, kemudahan dalam menjangkau program yang diberikan oleh pemerintah. Kelompok sasaran program ini yakni masyarakat harus memiliki kemudahan akses untuk bisa menghubungi pihak terkait untuk menggali informasi ataupun mengajukan keluhan.
- b. Cakupan, menentukan kelompok sasaran serta membandingkan

jumlah kelompok sasaran yang telah menerima layanan dengan keseluruhan kelompok sasaran merupakan cakupan. Kelompok sasaran yang telah dijangkau oleh program “*e-parkir*” menjadi cakupan dalam studi ini..

- c. Frekuensi, yaitu seberapa banyak sasaran program dapat menerima fasilitas yang dijanjikan. Tinggi rendahnya frekuensi layanan yang diberikan akan berpengaruh pada baik dan buruknya penerapan program tersebut.
- d. Bias, yaitu penyimpangan dimana pelaksanaan program tidak terjadi penyimpangan dalam keberjalanannya.
- e. Ketepatan layanan, yaitu dimana program tepat waktu atau *output* sebuah program sensitif terhadap ketepatan waktu, sehingga keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan. program.
- f. Akuntabilitas, yaitu apakah pelaksana program dalam menjalankan program ke kelompok sasaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang

mana tidak mengurangi hak-hak dari kelompok sasaran.

- g. Kesesuaian program dengan kebutuhan, adanya program yang berjalan dan dihaasilkan itu apakah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran atau tidak.

E-Parking

E-Parking yaitu parkir elektronik dimana perangkat yang gunanya menerima pembayaran parkir secara elektronik juga menggiring sebuah kota menuju kota pintar dengan langkah pemanfaatan teknologi. *E-parking* muncul sebagai solusi modern yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengotomatiskan proses pemantauan dan manajemen ruang parkir serta mengurangi waktu parkir (Zulhildi, 2023: 2). Melalui penerapan sistem ini, pengguna dapat membayar parkir secara elektronik dengan mudah.

E-parking (parkir elektronik) juga termasuk ke dalam bagian dari *smart parking system* (sistem parkir pintar), dimana menurut *San FransiscoMunicipal Transportation Agency* (dalam Naufal, 2017: 7) bahwa *smart parking system* bertujuan guna mempermudah pengelolaan parkir.

Smart City

Smart city ialah sebuah konsep pertumbuhan teknologi yang diimplementasikan di seluruh sistemnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Pratama (dalam Nurmawan, 2019: 1276) yang menyatakan bahwa *Smart city* adalah konsep pembangunan yang melibatkan penggunaan teknologi di suatu lokasi untuk memfasilitasi interaksi sistem yang rumit. Caragliu (dalam Kireina, 2017: 69) menyajikan sudut pandang alternatif, yang menyatakan bahwa *Smart city* ialah kota yang bisa memanfaatkan modal sosial dan sumber daya manusia guna mencapai kualitas hidup yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat dalam administrasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk. Lokus dari penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Teknik penentuan informan menerapkan teknik *snowball sampling*. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian, sebagai berikut: masyarakat, jukir, Dishub Kota Semarang. Sumber data

dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari observasi dan wawancara dengan informan, selanjutnya data sekunder berasal dari kegiatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kualitas data menggunakan teknik trigulasi sumber untuk menguji kebenaran data yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program *E-Parking* dalam Mewujudkan *Smart City* di Kota Semarang

Tingkat realisasi tujuan yang menunjukkan terwujudnya tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai efektivitas program. Untuk mengetahui efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di kota Semarang menurut Makmur (2011:7), ada 8 ukuran sebagai berikut:

1) Ketepatan penentuan waktu

Program *e-parking* dalam studi Ilmu Administrasi Publik adalah salah satu bentuk dari *New Public Service* (NPS), Hal ini karena difokuskan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempertimbangkan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pencapaian tujuan yang efektif menuntut administrasi publik yang bertanggung jawab, yang diperlukan untuk mewujudkan NPS yang efisien.

Parkir elektronik diluncurkan pada Februari tahun 2022 bersamaan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional. Ketepatan penentuan waktu, dapat berpengaruh kepada seberapa efektif program *e-parking* mencapai tujuan. Disini ketepatan penentuan waktu mengarah ke ketepatan dalam penentuan waktu pelaksanaan program, yaitu waktu yang ditentukan adalah pukul 8 pagi hingga 8 malam. Ketepatan waktu beroprasinya parkir elektronik dijelaskan oleh masyarakat, jukir, dan Dishub benar dilaksanakan pukul 8 pagi hingga 8 malam.

2) Ketepatan perhitungan biaya

Ketepatan perhitungan biaya, ini dilakukan agar program tidak

kekurangan dana atau anggaran sampai program tersebut selesai sesuai Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 sejumlah 450 juta bidang program parkir *on the street*.

Berdasarkan hasil wawancara, alokasi anggaran sudah sesuai menurut pihak Dinas Perhubungan karena alokasi sendiri meliputi segala aspek pendukung program seperti pembuatan rambu parkir elektronik, biaya mmt untuk papan informasi, biaya mobilisasi pemantauan. Menurut pihak jukir belum optimal dalam alokasi anggaran program, jukir mengeluhkan tidak adanya jaminan keselamatan kerja apabila terjadi kecelakaan, sedangkan jukir diberikan surat tugas untuk menjalankan pekerjaan parkir yang beralih ke sistem elektronik.

3) Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran, ini berarti bahwa standarisasi harus diterapkan saat menjalankan program *e-parking*. Keefektivitasan program diukur dengan ketepatan standar yang digunakan sesuai dengan Perwal 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Ketepatan pengukuran dilihat dari ketepatan

pengukuran alokasi pendapatan retribusi

Berdasarkan hasil wawancara adanya alokasi dana retribusi sudah sesuai dengan Perwal 70 Tahun 2021 yaitu sebanyak 50% PAD, 45% jukir, dan 5% aplikasi. Sesuai pengungkapan baik dari jukir dan Dishub, pengalokasian dana tersebut sudah berjalan dari semenjak awal peluncuran parkir elektronik pada tahun 2022. Ketepatan pengukuran ini sangat penting dalam penentuan keefektifan suatu program.

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan, ini adalah tindakan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena menentukan pilihan menggabungkan proses yang sangat penting untuk mencapai keefektifitasan sesuai dengan Perwal 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan ketepatan penentuan pilihan yaitu sistem elektronik dalam program *e-parking*. Sistem elektronik dipilih karena sesuai mengikuti perkembangan zaman yang modern ini. Sistem

elektronik dipilih dengan alasan menstimulus penggunaan teknologi di masyarakat sehingga diharapkan dapat berpindah dari sistem manual ke *online*. Sistem elektronik masih cukup asing di kalangan masyarakat, sehingga saat diterapkan *e-parking* masyarakat sebagian besar merasa kebingungan. Jukir parkir elektronik yang semula buta teknologi diberikan pelatihan agar dapat terbiasa menjalankan parkir elektronik.

5) Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir, dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan Perwal 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu dilihat dari ketepatan dalam pelayanan parkir yang meliputi pelaksana program dan lokasi program.

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan ketepatan berpikir adanya pelayanan parkir yang meliputi pelaksana program disini ialah Dishub yang menyelenggarakan program *e-parking* dan pengawas dalam pelaksanaan program, juga lokasi titik *e-parking* yang berada di ruas jalan raya utama dan berjumlah 436 titik parkir elektronik. Dishub

sebagai pelaksana program selalu siap dalam menangani masalah terkait parkir elektronik yang sedang berjalan.

6) Ketepatan dalam melakukan perintah

Ketepatan dalam melakukan perintah, ini adalah tindakan yang dapat memberikan instruksi dengan cara yang jelas dan mudah difahami sesuai dengan surat tugas yang diberikan Dishub ke petugas parkir dilihat dari ketepatan dalam surat tugas jukir *e-parking*.

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan ketepatan melakukan perintah yang dilihat dari ketepatan dalam surat tugas jukir ialah jukir sebelumnya didata oleh Dishub lalu kemudian diberikan surat tugas. Jukir yang telah diberikan surat tugas serta sudah didata sebelumnya, wajib mengikuti arahan untuk ikut dalam penyuluhan penggunaan aplikasi *e-parking*. Setelah itu kemudian melaksanakan tugas dengan menjalankan parkir elektronik di titik yang ditentukan.

7) Ketepatan dalam menetapkan tujuan

Ketepatan dalam menetapkan tujuan, tujuan yang tepat akan

membantu melakukan tugas dengan efektif sesuai dengan tujuan *e-parking* yaitu meningkatkan PAD dan kemajuan kota.

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan ketepatan dalam menetapkan tujuan, adanya beberapa titik parkir elektronik yang tidak dijaga oleh jukir sehingga membuat adanya parkir liar yang dapat muncul. Selain itu masyarakat yang kebanyakan masih sulit untuk meleak internet dan menganggap parkir elektronik sulit dan memilih membayar dengan uang tunai membuat belum optimalnya dalam pencapaian tujuan dari parkir elektronik tersebut.

8) Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran, dapat menentukan apakah tindakan yang diambil berhasil mencapai tujuan sesuai kriteria sasaran peserta program. Ketepatan sasaran dilihat dari ketepatan sasaran kriteria peserta program.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi sasaran dari peserta program ialah masyarakat. Sasaran yang ditentukan oleh Dishub ialah masyarakat umum yang mana program *e-parking* dapat dijangkau oleh setiap

masyarakat yang ingin membayar dengan non tunai di titik parkir elektronik yang ada di ruas jalan di Kota Semarang. Disini sasaran yang dimaksud sudah tepat karena masyarakat sudah paham akan program yang berjalan dan masyarakat sebagai sasaran program mulai menjalankan parkir elektronik.

Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas Program E-Parking dalam Mewujudkan Smart City di Kota Semarang

1) Akses

Akses yaitu salah satu faktor yang krusial dalam keberjalanan program *e-parking*. Akses yang berarti kemudahan dalam menjangkau program. Ripley dalam (Erwan dan Dyah, 2012: 105- 110) Dimana masyarakat memiliki kemudahan dalam menerima informasi juga melakukan pengaduan apabila terjadi suatumasalah terkait program yang berjalan.

Pada kenyataanya masyarakat masih bingung terkait informasi juga pengaduan mengenai keberjalanan *e-parking*. Dari hasil wawancara untuk sudut pandang Dishub menyatakan jika informasi juga pengaduan dapat dilakukang

dengan mengakses aplikasi Sapa Mbak Ita. Tetapi masyarakat juga juru parkir sedikit belum paham benar bagaimana langkah dalam pengaduan apabila terjadi masalah.

Akses dalam perolehan informasi juga pengaduan diyakini masih kurang dipahami masyarakat. Sehingga akses dalam hal ini termasuk ke faktor penghambat efektivitas, karena kemudahan dalam menjangkau program masih minim akibat kurangnya pemahaman terkait pengaduan.

2) Cakupan

Cakupan ialah penetapan kelompok sasaran yang telah dijangkau dalam keberjalanan program. (Erwan dan Dyah, 2012: 105- 110) Cakupan disini ialah masyarakat Kota Semarang yang memiliki kendaraan bermotor dan sering melakukan parkir di tepi jalan umum.

Jangkauan dari parkir elektronik sangatlah berpengaruh dalam efektivitas program *e-parking*. Jangkauan yang dimaksudkan dari hasil wawancara sudah sesuai dengan keberjalanan program yang perlu masyarakat Kota Semarang yang pastinya memiliki kendaraan

juga sering melakukan parkir di tepi jalan.

3) Frekuensi

Frekuensi seberapa banyak kelompok sasaran dapat memperoleh kemudahan dalam keberjalanan program. (Erwan dan Dyah, 2012: 105- 110) Banyaknya masyarakat yang merasa dipermudah dengan keberjalanan *e-parking* berdasarkan hasil wawancara ialah lebih banyak yang dipermudah daripada yang merasa kurangnyaman dengan parking elektronik.

Masyarakat Kota Semarang yang merasa keberatan dan malah merasa kesulitan dengan adanya parkir elektronik menjadi faktor penghambat efektivitas dengan adanya banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan kemajuan parkir.

4) Bias

Bias itu penyimpangan dimana keberjalanan program tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dari penyelenggara dalam keberjalanannya. (Erwan dan Dyah, 2012: 105- 110) Penyimpangan pada program *e-parking* dapat dilihat dari ada tidaknya bukti yang diperoleh

saat melakukan transaksi pembayaran parkir.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat sudah otomatis mendapatkan bukti yang langsung muncul pada riwayat transaksi di masing-masing dompet digital yang digunakan untuk membayar parkir. Dalam hal ini bias menjadi indikator faktor pendorong efektivitas program *e-parking* di Kota Semarang.

5) Ketepatan Layanan

Sebuah program memiliki sensitivitas terhadap waktu dalam hal ini program *e-parking* apakah sudah tepat waktu dalam keberjalanannya yang seharusnya mempersingkat waktu dalam penarikan retribusi parkir. (Erwan dan Dyah, 2012: 105- 110) Parkir elektronik dapat dikatakan efektif apabila sudah tepat terkait sensitivitas waktu yang mana diharapkan dapat mempersingkat waktu pembayaran retribusi parkir.

Berdasarkan hasil wawancara benar adanya *e-parking* ini membuat pembayaran menjadi semakin singkat dan tidak memakan waktu. Selain itu juga ada kontra dimana sebagian masyarakat tidak setuju dengan hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan budaya sistem manual

sehingga menganggap ini lebih memakan waktu.

6) Akuntabilitas

Program *e-parking* dapat dipertanggungjawabkan oleh Dishub terkait tidak adanya hak dari pengguna parkir dan juru parkir yang dikurangi. (Erwan dan Dyah, 2012: 105- 110) Hak pengguna parkir disini dimaksudkan mengenai keamanan parkir dan ketidakraguan untuk tidak lagi waspada dengan juru parkir liar, sedangkan hak juru parkir lebih ke pemberian upah ke juru parkir.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat sudah merasa aman untuk parkir dengan juru parkir berijin atau legal sehingga tingkat keraguan masyarakat mulai memudar sejak adanya parkir elektronik. Selain itu terkait hak jukir memperoleh upah, sesuai dengan peraturan yang lama pembagian hasil dilakukan setiap hari dengan pembagian 45% jukir, 50% PAD, dan 5% aplikasi.

7) Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kesesuaian program dengan kebutuhan, adanya program *e-parking* yang berjalan itu sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat yaitu memudahkan masyarakat guna

membayar retribusi parkir secara daring. (Erwan dan Dyah, 2012: 105- 110) Dari ini kita dapat melihat apakah adanya parkir elektronik sesuai dengan keinginan masyarakat yang ingin membayar dengan cepat, mudah, dan aman.

Dari hasil wawancara, kebanyakan masyarakat pengguna parkir secara luas merasa kurang suka dengan parkir elektronik, tetapi sebagian lagi sangat senang dengan adanya parkir elektronik ini benar benar menjamin keamanan transaksi juga cepat karena memanfaatkan teknologi.

KESIMPULAN

Efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang dapat dikatakan belum efektif karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada ukuran efektivitas program seperti ketepatan perhitungan biaya belum sesuai karena anggaran program dikeluhkan jukir yang menuntut adanya anggaran untuk jaminan keselamatan kecelakaan lalu lintas. Ketepatan dalam menentukan pilihan belum optimal karena pemilihan sistem elektronik dirasa masih menyulitkan masyarakat. Ketepatan dalam

menetapkan tujuan belum optimal dalam pencapaian tujuan karena masih ditemui titik parkir yang tidak diawasi jukir *e-parking*. Ketepatan berpikir belum berjalan dengan baik karena pelaksana program yaitu Dishub masih kurang dalam pengawasan, serta lokasi parkir elektronik ada yang berlokasi di jalan yang bukan jalan utama. Sedangkan ketepatan dalam melakukan perintah sudah berjalan dengan baik karena jukir mau melaksanakan *e-parking* sesuai surat tugas yang diberikan. Ketepatan sasaran sudah berjalan dengan baik karena masyarakat telah paham tentang parkir elektronik dan mau melakukan *e-parking*. Ketepatan penentuan waktu sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan ketentuan waktu beroperasi *e-parking* dijalankan mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Ketepatan dalam pengukuran sudah berjalan dengan baik karena alokasi pendapatan retribusi sudah sesuai yaitu 50% PAD, 45% jukir, dan 5% aplikasi.

Efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang dapat dikatakan belum efektif karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada indikator

faktor pendorong dan penghambat efektivitas program. Akses menjadi faktor penghambat karena belum mencapai hasil yang baik karena masyarakat belum paham cara melakukan aduan terkait kendala. Frekuensi menjadi faktor penghambat karena belum mencapai hasil yang baik karena banyak masyarakat yang merasa tidak mendapat kemudahan setelah adanya *e-parking*. Ketepatan layanan menjadi faktor penghambat karena belum mencapai hasil yang baik karena adanya parkir elektronik dirasa masih sulit dan membuat waktu semakin lama dalam transaksi. Kesesuaian program menjadi faktor penghambat karena belum mencapai hasil yang baik karena masyarakat masih banyak yang belum menggunakan *e-parking* karena merasa tidaksesuai dengan keinginan mereka yaitu melakukan transaksi secara mudah, cepat, dan aman. Sedangkan cakupan menjadi faktor pendorong karena sudah sesuai dimana masyarakat Kota Semarang adalah jangkauan dari program. Bias menjadi faktor pendorong karena tidak ada penyelewengan dengan diberikannya bukti transaksi. Akuntabilitas menjadi faktor

pendorong karena sudah sesuai pemenuhan hak masyarakat pengguna parkir dalam segi keamanan dan hak juru parkir mendapat upah sesuai dengan regulasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan efektivitas program *e-parking* yaitu yang pertama memperbaiki perluasan akses dalam melakukan pengaduan. Kedua, mengupayakan pemahaman mengenai kemudahan parkir elektronik. Ketiga, mengupayakan sosialisasi *e-parking* ke masyarakat. Keempat, mengupayakan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang transaksi *e-parking* yang mudah, cepat, dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Congge, Umar. (2017). Patologi Administrasi Negara. Makassar: Sah Media.

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penghambat dalam efektivitas program *e-parking* dalam mewujudkan *smart city* di Kota Semarang maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu pertama, untuk akses dengan cara Dishub memberikan sosialisasi cara aduan tentang *e-parking*. Kedua, untuk frekuensi dengan mengupayakan kesadaran akan kemudahan dari adanya *e-parking* di masyarakat. Ketiga, untuk ketepatan layanan dengan sosialisasi *e-parking* di masyarakat. Keempat, untuk kesesuaian program terkait kebutuhan masyarakat yang mudah, cepat dan aman dengan adanya sosialisasi *e-parking* di masyarakat.

Erwan, dkk. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Handyaningrat, Soewarno. (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.

Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hidayat, L. Misbah. (2007). Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. (1992) Analisis Data Kualitatif.

Mindarti, Lelu Indah. (2016). Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik. Malang: UB Press.

Pasolong, Harbani. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Sarinah dan Mardalena. (2017). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Deepublish.

Sitoyo, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Karanganyar: Literasi Media Publishing.

Undang-Undang

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016- 2021

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen

Target dan Realisasi PAD Tahun 2021-2023 (Dishub Kota Semarang 2024).

Jumlah Titik dan Juru Parkir di Titik Ruas *E-Parking* di Kota Semarang (Dishub Kota Semarang 2024)